

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini menganalisa dan menjelaskan strategi serta upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi anti *trafficking* dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di India. Perdagangan manusia dalam beberapa dekade terakhir telah muncul sebagai isu global yang digolongkan sebagai salah satu kejahatan lintas batas (transnational crime). Hal ini dijelaskan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui kongres yang diadakan di Kairo Mesir, pada tanggal 29 April-8 May 1995 yang telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan lintas batas, dan salah satunya adalah perdagangan manusia (human trafficking).¹

Beberapa peneliti seperti Ruchira Gupta dan David Masci menyebutkan perdagangan manusia telah berevolusi menjadi sebuah bisnis yang memberi keuntungan besar bagi kelompok-kelompok tertentu di dunia. Jika dibandingkan dengan kejahatan lintas batas lainnya, seperti penyelundupan barang-barang antik dan pencucian uang, maka perdagangan manusia digolongkan sebagai bisnis dengan tingkat keuntungan cukup tinggi hingga mencapai miliaran Dolar AS setiap tahunnya.² Keuntungan yang diperoleh tersebut berkisar antara lima miliar

¹ United Nations, “United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” (Cairo, Egypt, 29 April-8 May 1995), http://www.asc41.com/UN_congress/9th%20UN%20Congress%20on%20the%20Prevention%20of%20Crime/018%20ACONF.169.15.ADD.1%20Strengthening%20the%20Rule%20of%20Law.pdf, diakses pada 9 Maret 2014

² Ruchira Gupta, “Human Trafficking in Asia: Trends and Response,” Dalam buku *On the Move; Migration Challenges in the Indian Ocean Littoral* ed. Ellen Lapsion dan Amit Pandya. (Washington, DC: The Henry L. Stimson Center), hal 69

hingga tujuh miliar Dolar AS.³ Dengan keuntungan begitu besar yang akan diperoleh para pelaku tindak kejahatan tersebut maka memerangi perdagangan manusia jelas bukan usaha yang mudah. Menurut PBB, industri perdagangan manusia menempati urutan ketiga terbesar sebagai bisnis ilegal di dunia yang melebihi setiap perusahaan kriminal lainnya setelah obat – obatan terlarang dan perdagangan senjata.⁴

Terdapat tiga dimensi jalur perdagangan manusia, yakni perdagangan trans-regional, perdagangan manusia intra-regional, dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan intra-regional terjadi antara negara – negara berbeda dalam satu regional yang sama. Hal ini termasuk perdagangan lintas batas dan perdagangan antara negara – negara secara geografis berdekatan dengan satu sama lain. Dalam perdagangan trans-regional, korban diperdagangkan dari salah satu daerah ke daerah lain. Hal ini bisa menjadi perdagangan trans-benua, tetapi melibatkan arus perdagangan ke daerah tetangga di benua yang sama, seperti antara Eropa Timur, Barat dan Tengah atau antara Amerika Utara dan Amerika Tengah.⁵

Badan populasi dunia 2006, *United Nations Population Funds* menyebutkan bahwa kawasan tertinggi di dunia untuk penyediaan manusia yang akan diperdagangkan adalah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dengan sebagian besar yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak – anak.⁶ Di Asia selatan, *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) menyebutkan bahwa

³ 15 Facts on the Economics of Prostitution, *Red-Light Despatch*, November 2011, hal 6

⁴ David Masci, “Human trafficking and Slavery: Are the World’s Nations Doing Enough to Stamp It Out?,” *CQ Researcher* volume 14, no. 12 (March 26, 2004), hal 280

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, February 2009), hal 57

⁶ Ruchira Gupta, hal 69

Bangladesh, India, Nepal dan Pakistan merupakan negara asal tertinggi. Tidak hanya sebagai negara asal tertinggi, India dan Pakistan juga menjadi negara tujuan dengan peringkat tertinggi di Asia Selatan. Serta sebagian besar dari negara – negara di wilayah Asia Selatan merupakan negara transit untuk korban yang dikirim ke negara lainnya di belahan dunia. Asia Selatan diperkirakan menjadi asal bagi jumlah terbesar kedua perdagangan manusia yang diperdagangkan secara internasional, dengan jumlah sekitar 150.000 jiwa setiap tahunnya.⁷

India adalah negara yang menjadi asal, transit serta tujuan untuk perdagangan manusia. Perempuan dan anak diperdagangkan dari negara – negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal dengan negara tujuan adalah India. Dalam banyak kasus mereka diperdagangkan ke negara – negara di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah dan Eropa.⁸ 90% dari perdagangan manusia di India adalah perdagangan internal yakni perdagangan yang terjadi di wilayah domestik India dan sisanya merupakan perdagangan intra-regional dari negara – negara tetangga yang masih dalam satu kawasan dengan India.⁹ Dari negara tetangga 10% merupakan migrasi paksa, dengan sekitar 2,17% dari Bangladesh dan 2.6% dari Nepal.¹⁰ Korban perdagangan manusia diidentifikasi oleh pemerintah daerah Maharashtra, India, berdasarkan daerah asal dapat dilihat dari diagram berikut:¹¹

⁷ United Nations Office On Drugs And Crime, *Responding to Trafficking for Sexual Exploitation in South Asia* (Vienna: Nations Office On Drugs And Crime, 2007), hal 4 *Regional UN.GIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) Meeting, New Delhi, 10-11 October 2007*

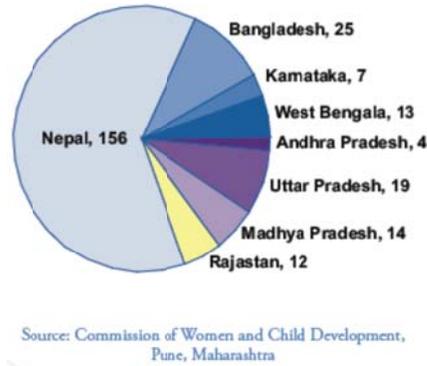
⁸ Ibid., 5

⁹ UNODC, *Responding to Trafficking for*, hal 5

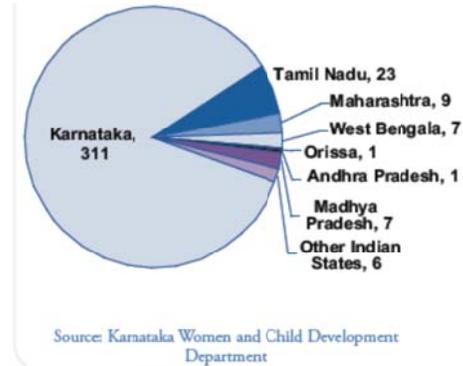
¹⁰ Ibid

¹¹ UNODC, *Global Report*, hal 58

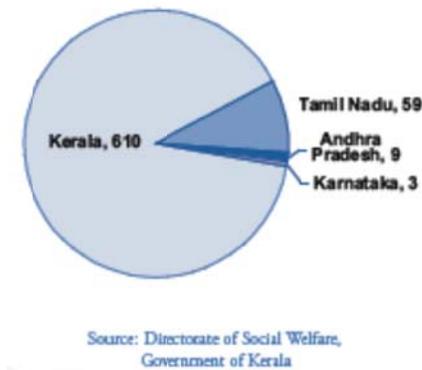
Gambar 1: korban TIP diidentifikasi oleh otoritas di Maharashtra India, dengan daerah asal (2005 – 2007)



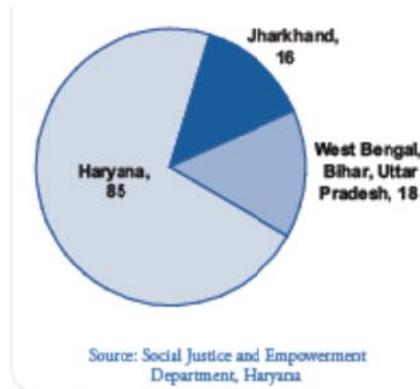
Gambar 2: korban TIP diidentifikasi oleh otoritas di Karnataka India, dengan daerah asal (2005 – 2006)



Gambar 3: korban TIP diidentifikasi oleh otoritas di Kerala, India, dengan daerah asal (2005 - 2006)



Gambar 4: korban TIP diidentifikasi oleh otoritas di Haryana, India, dengan daerah asal (2005 - 2006)



Data – data diatas memperlihatkan bahwa korban perdagangan manusia di India cukup tinggi. Data ini adalah data korban yang baru teridentifikasi dan masih ada korban – korban yang belum teridentifikasi. Fenomena perdagangan manusia ini dapat dianalogikan seperti fenomena gunung es, dimana yang muncul ke permukaan memang tidak dalam jumlah yang besar, namun jauh dibawah permukaan terdapat jumlah yang jauh lebih besar.

Fenomena yang terjadi di India dengan jumlah kasus yang tinggi dan posisi India sebagai negara asal, transit dan tujuan, menggiring India kepada permasalahan perdagangan manusia yang cukup rumit serta sulit untuk di atasi, sehingga perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman bagi India. Menanggapi permasalahan ini, maka masyarakat sipil muncul sebagai salah satu aktor non-pemerintah yang berkeinginan untuk melakukan tindakan penanggulangan terhadap perdagangan manusia. Salah satunya adalah *Non Governmental Organizations* (NGO) yang didirikan oleh Ruchira Gupta, seorang jurnalis wanita yang bekerja sama dengan perempuan-perempuan muda dan berani di rumah bordil Mumbai India. Organisasi yang didirikan oleh Gupta bersama rekan – rekannya bernama Apne Aap.¹²

Apne Aap muncul sebagai sebuah organisasi anti *trafficking* yang mewakili masyarakat lapisan bawah (grassroot). Visi Apne Aap untuk mencapai hak-hak dimana tidak ada wanita yang bisa diperjual belikan.¹³ Semenjak berdiri di tahun 2002 hingga tahun 2013, Apne Aap telah membawa sedikit banyaknya perubahan bagi masyarakat India, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan perdagangan manusia. Perubahan paling mendasar yang berhasil dilakukan oleh Apne Aap terletak pada perubahan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia di India. Sebelumnya, India adalah negara dengan kerangka hukum yang cacat mengenai perdagangan manusia, dimana India bukannya melindungi para korban dan menuntut para pelaku, tetapi malah sebaliknya

¹²Apne Aap, <http://apneaap.org/founder/founder-profile/profile-ruchira-gupta> terakhir di akses pada tanggal 21 November 2012, pukul: 07.01 WIB

¹³Apne Aap women worldwide, “*The Story of Apne Aap*”, <http://www.apneaap.org/about-us/the-story-of-apne-aap/> diakses 11 Mei 2013

korban yang dituntut dan para pelaku dilindungi.¹⁴ Namun, setelah upaya bertahun-tahun yang dilakukan oleh Apne Aap, melalui petisi, kampanye, advokasi dan rangkaian pertemuan dengan para anggota parlemen dan pemerintah dengan membawa langsung korban serta langsung memberikan kesaksian atas kejahatan yang menimpa mereka, semua upaya ini mencapai puncaknya dalam Amandemen Undang-Undang tindak Kriminal (the Criminal Amendment Bill 2013) yang disebut dengan Criminal Law (Amendment) Ordinance 2013, dengan ketentuan pasal khusus yakni pasal 370 dan pasal 370 A¹⁵. Pernyataan ini menyatakan bahwa perdagangan manusia sebagai sebuah tindak pidana langsung dan untuk pertama kalinya masuk kedalam *Indian Penal Code (IPC/KUHP)*.¹⁶ Selain itu, amandemen ini juga memberikan definisi yang lebih jelas dan tepat bagi perdagangan manusia serta sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh Protokol PBB.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengalaman Apne Aap untuk melihat strategi dan upaya organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia di India. Melalui langkah ini diharapkan akan dapat dijelaskan permasalahan disekitar organisasi/gerakan anti *trafficking* dan hubungan-hubungannya dengan perdagangan manusia. Sehingga apa yang telah dikakukan Apne Aap nantinya dapat dijadikan contoh serta pelajaran bagi organisasi/gerakan serupa yang ada di Indonesia maupun tempat-tempat lain dimana kasus perdagangan manusia cukup tinggi.

¹⁴ Sandika Hameed, et al., *Human Trafficking in India: dynamics, Current Efforts, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation* (USA: Stanford University press, 2010), hal 7

¹⁵ Lampiran 1

¹⁶ Apne Aap Women Worldwide, "Annual Report 2012-2013", hal 9

¹⁷ Red Light Despatch, (vol. VI Issue 2, Februari 2013), hal 8

1.2 Rumusan Masalah

Apne Aap adalah sebuah organisasi yang berawal dari keinginan seorang jurnalis untuk menyelamatkan anak – anak perempuan di perbatasan India dan Nepal yang dijual oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan bantuan dua puluh dua orang perempuan yang terlibat dan menjadi korban prostitusi di India maka terbentuklah sebuah komunitas yang anti terhadap perdagangan manusia. Komunitas yang berasal dan bekerja di masyarakat lapisan bawah ini, ternyata mampu melakukan usaha sampai ketinggian internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pencapaian mereka dalam mereduksi perdagangan manusia, adanya pengakuan internasional serta memiliki sumberdaya manusia tidak kurang dari 15.000 perempuan yang bekerja bersama – sama untuk memerangi perdagangan manusia di India, umumnya merupakan korban perempuan dan berasal dari kalangan lapisan bawah (*grassroot*). Keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai Apne Aap bukan berarti tanpa upaya dan pengorbanan, bahkan terdapat proses panjang yang mereka lalui. Oleh karena itu menjadi penting untuk meneliti strategi yang dilakukan Apne Aap dan perempuan – perempuan tersebut dalam penanggulangan isu perdagangan manusia. Dengan demikian fenomena ini akan menjadi lebih jelas jika diungkap dan dilihat dari perspektif perempuan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan utama dari penelitian ini adalah, *bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Apne Aap dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di India?* Pertanyaan

berikutnya yang juga penting untuk diajukan adalah *makna dari strategi dan upaya tersebut untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia*.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan latar belakang dan proses terbentuknya Apne Aap sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk menanggulangi isu perdagangan manusia di India
- b. Menjelaskan bentuk-bentuk strategi yang dijalankan oleh Apne Aap, upaya dan proses yang dilalui dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di India
- c. Menganalisa gerakan anti *trafficking* yang dipimpin dan dikelola oleh Apne Aap.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Jika penelitian ini berhasil dan unsur-unsur yang saling berhubungan di dalamnya dapat dijelaskan dengan baik, maka bisa dimanfaatkan untuk membantu peneliti lain dalam menetapkan indikator bagi gerakan dan organisasi *anti trafficking*.
- b. Selain itu dapat pula dimanfaatkan oleh unsur-unsur dalam organisasi anti trafficking guna menyempurnakan usahanya dan meningkatkan hasil dari perjuangannya

1.6 Studi Pustaka

Untuk memberi gambaran awal, dan pengetahuan serta referensi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang peran NGO baik keterlibatan NGO dalam pembangunan, maupun perubahan dalam masyarakat serta

perdagangan manusia khususnya, maka penulis berikan sedikitnya empat ringkasan penelitian mengenai NGO dan satu tulisan mengenai perdagangan manusia di India. Tujuan dari penulisan studi pustaka ini adalah, disamping untuk memberikan gambaran umum terhadap penelitian yang sudah-sudah, studi pustaka ini juga berfungsi untuk memberikan acuan serta memberikan perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Sebuah artikel yang dikeluarkan oleh *Journal of South Asian Development* dengan judul *in the name of 'poor and marginalized'? politics of NGO Activism with Dalit Women in Rural North India.*¹⁸ Mencoba untuk membongkar kompleksitas, kontradiksi dan tantangan yang diproduksi, direproduksi dan dibantahkan oleh aktivisme dan NGO perempuan Dalit. Melalui NGO perempuan dan hubungannya dengan negara dan lembaga donor internasional di pedesaan Uttar Prades, India Utara (wilayah ini dihuni oleh wanita Dalit yang mengisi hampir 21 persen dari total penduduk wanita), menggambarkan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari, seperti ketidaksetaraan gender, sistem kasta yang menempatkan perempuan pada posisi terbawah, tidak berpendidikan, dibayar dengan upah yang lebih murah dari kaum pria. Kesadaran wanita Dalit terhadap diskriminasi cukup tinggi sehingga mereka mulai berpikir untuk membebaskan diri mereka dari belenggu diskriminasi tersebut.

Randhika Govinda dalam penelitiannya melihat sebuah NGO lokal yang mampu memobilisasi para wanita merupakan suatu perubahan yang signifikan

¹⁸ Randhika Govinda, "In the Name of 'Poor and Marginalised' Politics of NGO Activism with Dalit Women in Rural North India," *Journal of South Asian Development* 4:1 (Sage 2009), hal 45-64

terhadap pembangunan di India.¹⁹ Pola ini dilihat dari gerakan perempuan Dalit, hubungannya dengan NGO yang bertujuan untuk menolong ‘kaum miskin’ dan terpinggirkan. Sebuah NGO dapat mengalami posisi naik dan turun dalam hubungan mereka dengan negara dan penyandang dana, namun upaya – upaya yang dijalankan oleh gerakan wanita Dalit dalam bentuk Asosiasi Wanita Dalit, memberikan pemberdayaan kepada perempuan agar tidak terlalu bergantung kepada NGO²⁰. Gerakan Dalit memiliki kemiripan dengan Apne Aap, dan telah menjadi kebiasaan pada aktivis masyarakat sipil perempuan India untuk memakai prinsip *self help* dalam usaha-usahanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian penulis berfokus kepada strategi serta upaya yang dilakukan Apne Aap dalam penanggulangan permasalahan perdagangan manusia di India. Bagaimana strategi dan upaya tersebut mampu membawa perubahan baik di tingkat individu, masyarakat serta pemerintah India sendiri terkait aktivitas perdagangan manusia di India.

Sebuah catatan yang terdapat dalam jurnal perempuan yakni *Violence Against Women*, yang ditulis oleh **Elora Halim Chowdhury** dengan judul *Negotiating State and NGO Politics in Bangladesh: Women Mobilize Against Acid Violence*,²¹ memperlihatkan bagaimana sebuah institusi negara dianggap gagal dalam melakukan perannya untuk memastikan perawatan yang tepat terhadap korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga melahirkan NGO dan kelompok perempuan yang peduli. Meskipun sangat dibatasi oleh

¹⁹ Rhandhika Govinda, hal 53

²⁰ Ibid., hal 55 - 58

²¹ Elora Halim Chowdhury, “Negotiating State and NGO Politics in Bangladesh: Women Mobilize Against Acid Violence,” *Journal of Violence Against Violence* Vol 13: 8 (Sage: 2007) 857-873

ketersediaan tenaga ahli, infrastruktur dan dana. Beberapa pemikiran tentang perilaku NGO perempuan telah menciptakan strategi dan visi alternatif untuk usaha-usaha perempuan guna memulihkan kaumnya dari korban kekerasan hingga menjadi perempuan yang mampu menolong dirinya sendiri. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, namun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang menjadi titik kebangkitan dari organisasi perempuan Apne Aap yang penulis teliti, penulis berfokus kepada penanggulangan permasalahan perdagangan manusia di India.

Selanjutnya sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal* yang ditulis oleh **Dr. M. Lektorwe** dan **Dr. D. Mpabanga**, dengan judul *Managing Non-Governmental Organizations in Botswana* mencoba membahas bagaimana perkembangan NGO di Botswana sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat sipil terhadap pembangunan negara. NGO sebagai sektor ketiga dari sistem pemerintahan di Botswana telah mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi dan politik. Sebagian besar NGO lokal di negara ini cenderung lebih *concern* kepada isu – isu kemanusiaan, dan kesejahteraan daripada isu – isu politik dan tata pemerintahan.²²

Lektorwe dan Mpabanga menjelaskan keberhasilan NGO melalui penjabaran beberapa profil dan pencapaian – pencapaian yang di capai oleh beberapa NGO seperti Ditswanelo merupakan satu – satunya organisasi nirlaba yang bertanggung jawab terhadap isu hak asasi manusia di Botswana yang telah

²² Dr. M. Lektorwe and Dr. D. Mpabanga, “Managing Non-Governmental Organizations in Botswana,” *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, vol 12(3) (2007), hlm 8

berhasil membentuk sebuah pusat misi, untuk mencari sebuah penegasan terhadap martabat manusia dan persamaan jender, etnik, agama, status sosial atau keyakinan politik.²³ Selanjutnya muncul organisasi perempuan yang bernama Emang Basadi (Stand up Women) merupakan sebuah organisasi perempuan yang tertarik dan berfokus kepada peningkatan status legal, budaya dan ekonomi perempuan di Bostwana. Organisasi ini membangun kepedulian terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh perempuan serta bertujuan untuk menekankan peran perempuan dan pengakuan partisipasi perempuan di dalam pembangunan nasional. Organisasi ini terlibat dalam berbagai macam seperti penelitian khususnya pada area hukum, pemerkosaan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan.²⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah, memfokuskan penelitian kepada satu organisasi perempuan yang bermain di area perdagangan manusia. Melihat bagaimana strategi yang dilakukan mampu membawa mereka kepada perubahan mendasar terhadap masyarakat India, terutama perempuan dan anak-anak agar terjauh dan selamat dari perdagangan manusia.

Buku yang ditulis oleh **Patrick Kilby** dengan judul *NGOs in India: the challenges of women's empowerment and accountability*²⁵, dapat digunakan sebagai contoh studi kasus untuk mendalami fokus perubahan sosial melalui program pemberdayaan perempuan. Sejak pertengahan 1980-an, NGO India merupakan bagian penting pembangunan pedesaan dan perkotaan, sementara pada saat yang sama alat ini diperlakukan dengan hati – hati oleh pemerintah. Namun

²³ Ibid

²⁴ Ibid., hal 10

²⁵ Patrick Kilby, *NGOs in India: the challenges of women's empowerment and accountability* (New York: Routledge, 2011)

setelah tahun 1990-an kredibilitas dan keefektifan dari NGO juga mulai dipertanyakan. Perdebatan berkepanjangan yang tak kunjung usai diantara pemikir – pemikir ilmu sosial bagaimana cara mengukur keefektifan tersebut, dapat ditemukan jawabannya dengan cara melihat secara langsung kepada NGO lokal India.

Patrick Kilby, pada studi lapangan yang dilakukannya terhadap NGO lokal di Karnata dan Maharashtra India menemukan bahwa kondisi yang berubah dapat menyebabkan tantangan dan perubahan dalam cara NGO lokal beroperasi. Didalam temuannya ini Ia menampilkan sejarah dan perkembangan NGO di India, hubungan NGO dan negara serta hubungan NGO India dengan para pendonor Internasional.²⁶ Temuan-temuan Kilby membantu kita untuk memperjelas cakupan peran dan fungsi khusus NGO melalui pendekatan pemberdayaan terhadap perempuan. Dalam perkembangannya proses yang dilakukan oleh sebuah NGO di India sehingga mengarah kepada upaya mereka untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Mengacu kepada tulisan Kilby, pemberdayaan perempuan boleh jadi merupakan salah satu cara bagi sebuah NGO untuk menekan permasalahan perdagangan manusia. Namun pemberdayaan tanpa otonomi dan kemampuan mencukupi diri sendiri adalah sebuah logika yang mustahil.

Sebagai pelengkap dari studi pustaka ini, maka penulis menambahkan sebuah referensi studi pustaka yang terkait dengan aktivitas perdagangan manusia di India yang tentunya akan membantu dan mendukung proses penelitian ini. Sebuah laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Sadika Hameed, Sandile**

²⁶ Patrick Kilby, hal 1-3

Hlatshwayo, Evan Tanner, Meltem Türker, dan Jungwon Yang dengan judul *Human Trafficking in India: Dynamics, Current Efforts, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation*.²⁷ Laporan ini memaparkan, bahwa perdagangan manusia yang terjadi di India baik itu dengan tujuan untuk kerja paksa dan/atau perbudakan serta tujuan untuk eksploitasi seksual merupakan aktivitas yang banyak terjadi dan sebuah masalah yang cukup serius bagi India. Didalam laporannya, para peneliti menuliskan dinamika perkembangan aktivitas perdagangan manusia di India, dimulai dari pemahaman bersama mengenai perdagangan manusia, bagaimana perekrutan serta faktor – faktor yang menyebabkan aktivitas ini terjadi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial di India, keberadaan serta upaya – upaya yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah/NGO, para pendonor dan Pemerintah dalam menghentikan aktifitas perdagangan manusia ini serta bentuk – bentuk intervensi yang mereka lakukan untuk menekan perdagangan manusia. Tipe – tipe intervensi ini (untuk pemerintah dan NGO/donor) diklasifikasikan berdasarkan kepada *UN protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking Especially Women and Children* (2003). Protokol tersebut mengidentifikasi ada tiga jenis intervensi: *prevention*, *prosecution*, dan *protection* (3Ps). Kemudian disingkat menjadi “3Ps”, dan kebanyakan kelompok menambahkan klasifikasi keempat yakni; *capacity building*.

²⁷ Sandika Hameed et al., *Human Trafficking in India: Dynamics, Current Efforts, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation* (USA: Standford University press, 2010), hal 23-29

- **Prevention** *relates to activities geared towards economic empowerment and education and awareness building, with the goal that would-be victims will not be as vulnerable to traffickers.*
- **Prosecution** *regards activities focused on the criminalization of trafficking, implementation of anti-trafficking legislation, and the prosecution of offenders.*
- **Protection** *is victim-focused and concerned with providing a viable post-trafficking transition back to some sense of normalcy. NGOs that run shelters or provide post-trauma counseling all fall into the classification of protective activities.*
- **Capacity building** *refers to those activities that improve the functionally and absorptive capacity of organization, institutions, and/or groups. For instance, a sensitization-training program for police would be considered capacity building. Similarly, research is also considered capacity building.²⁸*

Dalam laporan ini penulis lebih fokus kepada laporan mereka mengenai upaya – upaya yang dilakukan oleh Non Governmental Organizations (NGO) yang anti terhadap kegiatan perdagangan manusia. Laporan ini nantinya akan cukup mendukung dan membantu penelitian yang akan penulis lakukan terutama jenis intervensi diatas yang juga berfungsi untuk menganalisa strategi yang dilakukan oleh Apne Aap dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di India. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih kepada tindakan yang akan dilakukan dan diambil oleh organisasi

²⁸ Sandika Hameed, hal 23

gerakan anti-trafficking dalam menghentikan aktivitas ini. Tentunya setiap aktor dalam masyarakat memiliki cara yang berbeda dan cara tersendiri dalam melakukan aksinya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan itulah yang dilakukan oleh Apne Aap.

1.7 Kerangka konseptual

1.7.1 Empat Strategi Generasi NGO Pembangunan Korten

Empat strategi generasi NGO ini, merupakan sebuah kerangka yang dihasilkan dari penilaian Korten terhadap perilaku dan pengalaman kritis NGO itu sendiri dalam proses pembangunan.²⁹ Korten melihat adanya pola evolusi tertentu dalam masyarakat yang menyebabkan NGO bergerak lebih jauh dari kegiatan bantuan tradisional menuju ke keterlibatan yang lebih besar dalam mengkatalis perubahan besar terhadap kelembagaan dan kebijakan. Pola ini melibatkan tiga tahap yang dapat diidentifikasi atau generasi orientasi strategis yang masing-masing bergerak lebih jauh dari mengurangi gejala-gejala kearah untuk menyelesaikan penyebab yang lebih mendasar dari setiap permasalahan pembangunan dalam masyarakat. **Tahapan ini-lah yang dinamai oleh Korten sebagai generasi.**

Setelah kerangka strategi ini pertama kali diformulasikan yang hanya terdiri dari tiga tahap, kemudian menuai respon positif dari para pemimpin-pemimpin NGO yang memberikan gagasan evolusi lebih lanjut termasuk saran

²⁹ David. C Korten, *Getting to 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, (West Hartford: Kumarian Press, 1990), hal 115

bahwa strategi generasi keempat harus ditambahkan agar kerangka ini menjadi lengkap.³⁰

Strategi generasi pertama: *Relief and Welfare*

Strategi generasi pertama melibatkan NGO dalam pengiriman langsung layanan untuk memenuhi kekurangan dan ketidakcukupan langsung yang dialami oleh kelompok ataupun populasi penerima manfaat, seperti kebutuhan untuk makanan, perawatan kesehatan atau tempat perlindungan. Strategi tersebut sangat relevan dengan bantuan darurat kemanusiaan pada saat bencana alam atau krisis, seperti kelaparan, banjir atau perang ketika kebutuhan manusia segera harus dipenuhi.³¹

Strategi generasi pertama tumbuh dari sejarah panjang tindakan sukarela internasional yang bertujuan untuk membantu para korban perang dan bencana alam dan menyediakan layanan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, kelompok agama umumnya telah berada pada garis depan upaya ini.³² NGO yang telah melakukan strategi generasi pertama atas nama pembangunan telah secara implisit diasumsikan yang mungkin sebagai pengalaman mereka sendiri bahwa dengan upaya bantuan darurat jangka pendek, sedikit masyarakat yang dibantu akan bisa kembali berdiri dengan kaki mereka sendiri.³³

Pada strategi generasi pertama ini NGO menjawab sebuah kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang terlihat. NGO berperan sebagai pelaksana

³⁰ Ibid

³¹ Gerard Clarke, "The Politics of NGOs In South – East Asia", (London; Routledge, 1998), hal 13

³² David C. Korten, hal 115

³³ Ibid., hal 116

sedangkan masyarakat penerima manfaat berperan sebagai pihak yang pasif. Hal ini mengantarkan NGO ke strategi generasi kedua, karena memang upaya bantuan itu tetap penting, namun disisi lain hanya akan membangun ketergantungan dari pihak penerima manfaat dan mereka akan sulit untuk menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa bantuan dari NGO. Hal ini yang mengantarkan NGO kepada tahap selanjutnya, ke strategi generasi kedua.

Strategi generasi kedua: *Small Scale, Self-reliant Local Development*

Strategi generasi kedua berfokus pada daya dari NGO dalam pengembangan kapasitas masyarakat untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui tindakan lokal mandiri (*self reliant local action*)³⁴. Hingga mematahkan ketergantungan yang dihasilkan dari bantuan-bantuan amal atau kemanusiaan melalui pemberdayaan dan tindakan lokal mandiri.³⁵ Penekanan pada kemandirian lokal dan pemberdayaan ini lah yang membedakan antara strategi generasi pertama dan strategi generasi kedua. Karena perhatian mereka untuk keberlanjutan, strategi generasi kedua sering disebut sebagai strategi pembangunan masyarakat.³⁶

Strategi generasi kedua berbeda dalam sejauh mana mereka berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia atau pemberdayaan sebagai isu sentral. Sementara strategi generasi kedua hampir secara universal melibatkan fokus besar pada pendidikan, tradisi pengembangan sumber daya manusia menganggap bahwa

³⁴ Iain Attack, "four criteria of development NGO legitimacy," *word development journal* Vol. 27, No. 5 (1999), hal 856

³⁵ Gerard Clarke, hal 13

³⁶ David C. Korten, *Getting to 21st century*, hal 118

masalah terletak secara eksklusif dalam kurangnya keterampilan individu dan kekuatan fisik.³⁷

Strategi generas ketiga: *Sustainable System Development*

Strategi generasi ketiga melihat melampaui komunitas individu dan mencari perubahan dalam kebijakan dan lembaga tertentu di tingkat lokal, nasional dan global.³⁸ Strategi ini memungkinkan NGO dalam penciptaan lembaga-lembaga baru dan cukup besar, peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan perubahan peran NGO dari penyedia layanan menjadi katalis terutama dalam memobilisasi masyarakat setempat.³⁹ Menyangkut keterlibatan dalam “kelembagaan dalam skala yang lebih besar dan dalam konteks kebijakan” mempengaruhi kerja NGO pembangunan atau berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan oleh pemerintah dan organisasi multilateral.⁴⁰ Strategi generasi ketiga berfokus kepada pembuatan kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang memfasilitasi, bukannya menghambat aksi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi generasi keempat: *Facilitating People's Movements*

Strategi generasi keempat melihat melampui fokus inisiatif yang ditujukan untuk mengubah kebijakan dan subsistem struktural kelembagaan tertentu melalui NGO yang semakin kompleks, baik secara nasional maupun internasional.⁴¹

³⁷ Ibid., hal 119

³⁸ Ibid., hal 120

³⁹ Gerrard Clarke, *The Politics of NGO*, hal 13

⁴⁰ Iain Attack, hal 856

⁴¹ Gerrard Clarke, *The Politics of NGO*, hal 13

Tujuan dari strategi generasi keempat ini adalah untuk memberi dukungan kritis masa independen, desentralisasi inisiatif dalam mendukung visi sosial.⁴²

Dalam praktiknya sulit untuk mengidentifikasi NGO di bidang pembangunan yang memiliki pengalaman khusus dengan strategi generasi keempat, karena pembangunan secara umum tidak dipandang sebagai sebuah gerakan. NGO dengan orientasi strategi ini secara umum ditemukan bekerja dalam mendukung perempuan, perdamaian, hak asasi manusia, *consumer affairs* atau gerakan lingkungan.⁴³ Namun, menjadi jelas bahwa ada kebutuhan untuk memobilisasi gerakan rakyat di sekitar visi pembangunan masyarakat terpusat, dan ada bukti bahwa gerakan seperti itu muncul.⁴⁴

Keempat strategi generasi yang dikembangkan oleh Korten tidak penulis gunakan seluruhnya, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan strategi generasi kedua, ketiga dan keempat. Dengan ketiga strategi generasi tersebut penulis menganalisis strategi yang dilakukan oleh Apne Aap sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan kebebasan bagi setiap perempuan untuk terhindar dari aktivitas perdagangan manusia. Strategi tentunya memiliki rangkaian pendekatan ataupun rangkaian aksi untuk mencapai tujuannya tersebut. Rangkaian-rangkaian ini merupakan proses-proses yang berkelanjutan akan menetapkan isi di dalam, apakah itu menyangkut pendekatan maupun aksi NGO

1.7.2 Konsep perdagangan Manusia (*human trafficking*)

Perdagangan manusia merupakan isu yang men-dunia dengan memiliki banyak pendefenisian yang diberikan terhadapnya. Namun jika kita merujuk

⁴² David C. Korten, *Getting to 21st century*, hal 127

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid., hal 128

kepada Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak tahun 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children), suplemen Konvensi PBB untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNTOC) sesuai pasal 3 ayat (a) mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, eksploitasi untuk memprostitusikan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek – praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.⁴⁵ Pengertian perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh protokol PBB, berlaku secara universal, namun dikembalikan kepada masing-masing negara dalam penerapannya.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Protokol PBB tersebut jelas bahwa perdagangan manusia memiliki tiga unsur konstituen,⁴⁶ diantaranya:

- *The Act* (apa yang dilakukan); perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang

⁴⁵ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, diterjemahkan oleh Martha Widjaja, Caprico Erwin, Achmad Hasan dan Dian Octaria (Jakarta: United States Agency for International Development, 2003)

⁴⁶ *What is Human Trafficking*, <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menu> (diakses pada 20 september 2013)

- *The Means* (bagaimana ini dilakukan); ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyebaran, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi pembayaran atau manfaat bagi seseorang dalam mengendalikan korban
- *The Purposes* (Mengapa ini dilakukan); untuk tujuan eksploitasi, yang meliputi memanfaatkan orang lain untuk prostitusi, eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik serupa dan pengambilan organ tubuh.

Ketiga elemen dasar di atas memperlihatkan bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan atau *trafficker*, merupakan bentuk kekerasan, penindasan serta diskriminasi, sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Sehingga secara global, permasalahan perdagangan manusia dipandang sebagai permasalahan perempuan dan anak-anak, yang telah menjadi satu dengan isu kemiskinan. Sebuah permasalahan yang hingga saat ini cukup sulit untuk ditanggulangi oleh masyarakat internasional pada umumnya dan negara pada khususnya.

Didalam pendekatan feminis, perempuan, anak-anak serta kelompok miskin merupakan subjek yang rentan terhadap penindasan dan diskriminasi, yang dihubungkan dengan kekuasaan dan dominasi laki-laki di berbagai level kehidupan. Dalam hal ini perdagangan manusia, dianggap atau dinilai sebagai sebuah akibat dari kekuasaan laki-laki (patriarki), maka tujuan utama dari pendekatan feminis adalah untuk membongkar dan menyelamatkan perempuan serta kelompok tertindas lainnya dari dominasi tersebut, mengeluarkan mereka dari segala bentuk penindasan dan diskriminatif yang disebabkan oleh ketidakadilan gender. Menjadi tugas yang esensial bagi kaum feminis untuk

mendekonstruksikan gender, untuk mencapai emansipasi. Merekonstruksikan bentuk-bentuk solidaritas perempuan dan resistensi perempuan atas meningkatnya eksploitasi dan fragmentasi tenaga kerja dan identitas gender akibat meningkatnya mobilitas arus modal dan manusia juga menjadi isu-isu penting dalam pendekatan feminisme.⁴⁷

Dengan demikian isu perdagangan manusia menjadi *concern* para pemikir feminis dengan membawa kepentingan perempuan kepermukaan, sehingga permasalahan ini memperoleh perhatian yang lebih dari negara dan dunia internasional.

1.7.3 Konsep Kepentingan Perempuan

Berbicara mengenai kepentingan perempuan di ruang publik maupun privat cukup menuai perdebatan dikalangan pemikir dan ahli feminis. Seorang ahli politik bernama Joni Lovenduski di dalam bukunya yang berjudul *Feminizing Politics*, Lovenduski berpendapat bahwa cukup mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kepentingan kaum perempuan.⁴⁸ Lena Wangnerud di dalam tulisannya mengenai para legislator Swedia, telah menjelaskan bagaimana konsep kepentingan perempuan sekaligus umum dan kontroversial di antara para ahli feminis.⁴⁹

Dengan mengikuti alur perdebatan–perdebatan feminis mengenai kesejahteraan negara, Wangnerud menyatakan bahwa kepentingan bersama kaum perempuan adalah meningkatkan otonomi mereka, sebuah proses yang menuntut

⁴⁷ Scott Burchill and Adrew Linklater, *Theories of International Relations*, diterjemahkan oleh M. Sobirin, Bandung: Nusa Media, 2011

⁴⁸ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, diterjemahkan oleh. Hardono Hadi (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2008), hal 280

⁴⁹ *Ibid.*, hal 281

‘politisasi pengalaman kehidupan harian kaum perempuan sampai tingkat yang sama seperti laki – laki’. Secara implisit, politisasi seperti itu membawa isu-isu baru dalam agenda politik, mengubah prioritas dan mengantar ke politisasi atau (politisasi yang lebih besar) ke masalah-masalah yang terutama menimpa perempuan, seperti kebijakan dan kesetaraan gender, hak-hak reproduksi dan pengasuhan anak.⁵⁰

Disisi lain menilai konsep kepentingan kaum perempuan akan lebih bermanfaat jika kita menggunakan istilah “gender” daripada “perempuan”. Kepentingan gender mengakui kenyataan bahwa kepentingan perempuan sebagai seorang individu bisa jadi banyak, ditentukan oleh posisi sosial dan identitas etnisnya sebanyak kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan yang sama–sama dimiliki perempuan.⁵¹

Istilah kepentingan gender “praktis” dan “strategis” dikemukakan pertama kali oleh Maxine Molyneux pada tahun 1985. Ia membedakan antara: (i) kebutuhan yang dihasilkan perempuan dalam melakukan peran – peran sosial khusus, dan (ii) kepentingan perempuan sebagai kelompok sosial dengan akses yang tidak sama terhadap sumber daya (ekonomi, sosial dan politik).⁵²

Memenuhi kebutuhan gender praktis perempuan dapat digunakan misalnya untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, karena memungkinkan perempuan melakukan peran gender

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half A Chance: An Introduction to Gender and Development*, diterjemahkan oleh Hartian Silawati (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), hal 214-15

⁵² Anastasia Nicole Slamat, “NGOs as linkages between grassroots women and the state: Prospect for state feminism in South Afrika” (Master mini thesis, Stellenbosch University, maret 2013), hal 25-26

tradisionalnya, yang secara efektif menolak asumsi tentang tugas perempuan— sama seperti memberi sandaran kepada sistemnya.⁵³

Sedangkan kepentingan gender strategis adalah kepentingan yang berasal dari suatu analisis mengenai subordinasi perempuan. Kepentingan itu merujuk kepada organisasi masyarakat alternatif, yang lebih adil dan memuaskan berkenaan dengan hubungan laki – laki dan perempuan. Dalam hal ini, identifikasi kepentingan gender strategis perempuan merupakan bagian dari strategi feminis yang ditujukan untuk mengubah hubungan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang menyusun semua kawasan kehidupan keluarga, pendidikan, kesejahteraan, dunia kerja dan politik, kultural dan hiburan.⁵⁴

Kepentingan kaum perempuan secara garis besar tertuang di dalam pernyataan kebijakan Overseas Development Administration (ODA) Inggris tahun 1989 yaitu untuk mencapai perlakuan yang lebih baik terhadap perempuan di waktu yang bersamaan merupakan langkah utama dalam penghapusan kemiskinan dunia, memperluas kesempatan sosial dan memberi rangsangan bagi pembangunan ekonomi yang lebih baik. Jika perempuan dilibatkan, hasil yang didapatkan oleh masyarakat dunia akan lebih baik dikarenakan sebagian besar dari penduduk miskin di dunia adalah perempuan. Jika sebagian besar dari mereka diberdayakan, diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak, Ia akan memberikan sumbangan pembangunan yang lebih produktif dan dinamis terhadap pembangunan dunia.⁵⁵

⁵³ Julia Cleves Mosse, hal 216

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Julia Cleves Mosse, hal 206

Kepentingan perempuan yang dijelaskan di atas berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisa perjuangan yang dilakukan oleh Apne Aap dilihat dari sisi kepentingan perempuan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Apne Aap merupakan perwujudan dari kepentingan dan kebutuhan perempuan sebagai seorang individu dan bagian dari masyarakat sosial. Kepentingan perempuan ini juga akan mampu untuk menjelaskan makna dari perjuangan serta upaya yang telah dilakukan oleh Apne Aap terhadap perempuan-perempuan India khususnya perempuan yang rentan terhadap perdagangan manusia. Untuk memudahkan proses analisa penulis juga menambahkan konsep kepentingan perempuan di level *grassroot* sebagai sebuah alat analisa terhadap Apne Aap karena sebagian besar perempuan yang menjadi anggota maupun relawan di Apne Aap adalah perempuan-perempuan yang berasal dari level *grassroot* dan secara tidak langsung Apne Aap pun merupakan organisasi *grassroot*.

Kepentingan Perempuan di Level Grassroot

Kepentingan perempuan secara umum tidak akan jauh berbeda dengan kepentingan perempuan pada level *grassroot*. Kepentingan – kepentingan tersebut dapat diaplikasikan pada level *grassroot* karena apa yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh kaum perempuan itu adalah hal yang sama. Kepentingan tersebut cenderung terdapat pada kelompok-kelompok perempuan di tingkat bawah, yang pada dasarnya mereka adalah perempuan miskin yang terpinggirkan. Kepentingan strategis juga menjadi alasan untuk munculnya organisasi-organisasi perempuan serta gerakan – gerakan perempuan dan keberadaan mereka membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik gender.

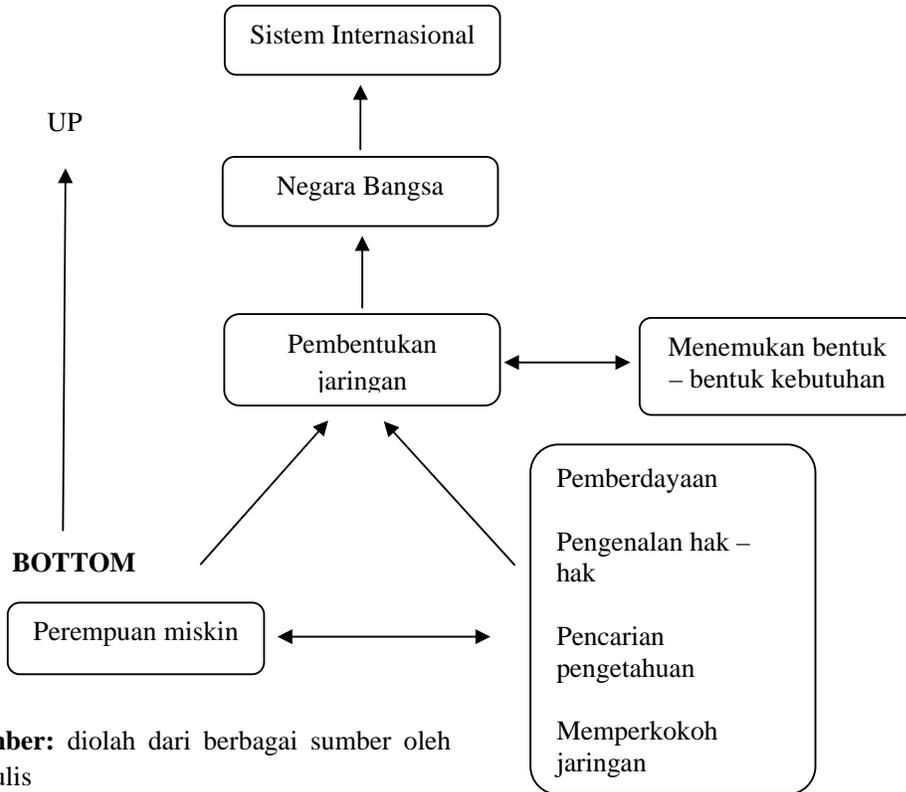
Bukti yang lebih jauh mengenai kepentingan perempuan di level *grassroot* bisa didapat dengan melihat kepada kekuatan khusus kelompok perempuan. Caroline Moser berpendapat bahwa “secara historis telah diperlihatkan bahwa kemampuan menghadapi sifat ketidakadilan gender ... hanya bisa dipenuhi melalui perjuangan dari bawah ke atas oleh organisasi perempuan”.⁵⁶ Perjuangan ini ditemukan pada organisasi perempuan desa Bangladesh, perempuan perkotaan di Rio de Janeiro dan Nairobi, yang menawarkan kepada perempuan hal yang sebaliknya yang tadinya tidak dimiliki oleh perempuan. Ruang ini baik fisik maupun konseptual, merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan kemudian melakukan mobilisasi untuk memenuhinya⁵⁷

Maka kepentingan kaum perempuan pada level *grassroot* dicapai dengan membuat jaringan yang kuat dengan perempuan – perempuan miskin di tingkat bawah, yang menemukan bentuk-bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka lalu memobilisasinya sehingga mereka lebih berpotensi untuk membawa perubahan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pada level *grassroot* membuat kaum perempuan lebih peduli dan mampu untuk memaksimalkan pengetahuan mereka mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, dari tingkat bawah mereka mulai bergerak menuju ke atas pada tingkatan yang lebih tinggi yakni negara dan sistem internasional. Mengacu pada alur yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan atau digambarkan pada Gambar 5 berikut:

⁵⁶ Ibid., hal 238

⁵⁷ Ibid., hal 239

Gambar 5. Alur jalannya pencapaian kepentingan Perempuan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*; disimpulkan oleh penulis



Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis

Perwujudan keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh kelompok ataupun organisasi perempuan tentunya tidak dilakukan dengan sendirinya, tetapi mereka membutuhkan intervensi pemerintah, bahkan sampai ke tingkat internasional, dalam hal-hal tertentu akan berhubungan dengan sistem-sistem yang digunakan negara dan dunia. Hal-hal tersebut contohnya dalam upaya mereka untuk mengubah undang-undang terkait kepedulian yang mereka perjuangkan, atau untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah komunitas yang diakui serta berbadan hukum dan terdaftar secara resmi di dalam sistem negara sebagai salah satu bagian dari tatanan negara dalam mendukung proses

pembangunan nasional dan hal lain sebagainya sampai ke tingkat internasional. Hal yang sama mestinya juga berlaku pada Apne Aap di India. Namun untuk mendapatkan kedalaman maknanya maka dibutuhkan sebuah pendekatan khusus yaitu pendekatan feminis, dengan metode yang khusus pula yaitu metode feminis, agar nilai-nilainya bisa dirumuskan dalam konteks perempuan atau gender dalam sistem kenegaraan dan atau sistem internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi lebih merupakan teori dan analisis tentang bagaimana seharusnya penelitian akan dilakukan atau ilmu tentang metode-metode yang berisi standar prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman penelitian.⁵⁸ Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu hal-hal yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.⁵⁹

1.8.1 Pendekatan Feminisme dalam penelitian

Feminisme meyakini selama beberapa dekade wacana ilmu pengetahuan sosial telah dibangun berdasarkan kepada pengalaman, ekspresi dan persepsi laki-laki tentang dunia, bahkan penelitian tentang masalah perempuan seringkali dirancang, diinterpretasi dan dianalisis berdasarkan cara pandang maskulin, tidak berpijak pada pengalaman hidup perempuan itu sendiri sehingga menyebabkan bias gender.⁶⁰ Pengalaman hidup, ide, pemikiran serta kebutuhan perempuan

⁵⁸ Elli Nur Hayati, "ilmu pengetahuan +Perempuan =...", *Jurnal Perempuan; untuk pencerahan dan kesetaraan*, no 48 (2006) hal 8

⁵⁹ Husaini usman dan Purnomo Setiady, *metodologi penelitian social:metode penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal 42

⁶⁰ Elli Nur Hayati, hal 9

selama ini relatif absen dari riset ilmu penelitian sosial karena kita hidup dalam dunia yang mengutamakan nilai-nilai, perspektif dan pengetahuan yang maskulin sebagai kebenaran objektif.⁶¹

Sejak kemunculannya di tahun 1980-an *Feminist Research Methodology* (FRM) menjadi bagian terpenting dalam tradisi penelitian dan ilmu sosial. FRM menjadi metode penelitian emansipatoris yang dirancang untuk meneliti permasalahan kondisi sosial perempuan dalam dunia yang sangat *sexist*, *malestream*, dan masyarakat yang patriarki. FMR menjadi metode kritis terhadap tradisi penelitian yang telah ada berpuluh-puluh tahun sebelumnya menggunakan tradisi positivist.⁶² FRM ini berpotensi untuk meneliti dan mendalami kejadian-kejadian yang dialami oleh perempuan seperti perempuan dan kemiskinan, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, buruh migran dan banyak hal lainnya yang dialami perempuan terutama terkait hal-hal seperti subordinasi, marginalisasi dan gender.

Judith Lorber menekankan bahwa metodologi feminis menjadi satu - satunya cara untuk mengetuk masuk dan memahami kenyataan yang dialami perempuan,⁶³ menuju pemahaman produksi pengetahuan feminis beserta kritik dan alternatifnya terhadap praktik-praktik produksi pengetahuan yang sering kali meminggirkan pengalaman perempuan.⁶⁴

Menurut Patricia Maguire gagasan metodologi feminis merupakan gabungan dari: 1) teori dan konsep tentang bagaimana suatu penelitian

⁶¹ Ibid

⁶² Muhayani, "Metodologi Penelitian Feminis: Kasus Perceraian' (Feminist Research Methodology: Divorce Case)", *Egalita Journal for Gender Justice and Equality*, Vol IV, No 1 (2009), hal 1

⁶³ Elli Nur Hayati, hal 7

⁶⁴ Muhayani, hal 1

(pengumpulan data) seharusnya dilakukan dan 2) cara pandang yang bisa melihat perempuan selama ini ditindas dan segera harus dibebaskan.⁶⁵ Sehingga berdasarkan penjabaran singkat mengenai metodologi feminis diatas maka, peneliti merasa pendekatan feminisme akan mampu menjelaskan posisi Apne Aap serta pengalaman yang dialami Apne Aap untuk menghasilkan sebuah ilmu terkait perdagangan manusia, Apne Aap berdiri berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, sehingga melalui cara pandang feminisme akan mampu membongkar bagaimana pengalaman yang mereka alami menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti dan diungkapkan.

1.8.2 Prosedur Metodologi Feminis

Merujuk pada paparan Judith Cook dan Mary Margareth Fonow terdapat empat prosedur metodologis secara garis besar muncul dalam bentuk yang berbeda-beda dan berulang-ulang dinyatakan dalam penelitian feminis. Keempat prosedur ini dapat berjalan bersama-sama dalam satu proses. Prosedur tersebut adalah :⁶⁶

1. Refleksitas

Refleksi meminta peneliti untuk menyadari dengan terbuka berlangsungnya proses mengetahui atau teoretisasi yang dilakukan. Cook dan Fonow menjelaskan, “dengan refleksi kami bermaksud memakai tendensi feminis untuk merefleksikan, menguji secara kritis dan mengeksplorasi secara analitis prinsip dasar proses-proses penelitian”.

⁶⁵ Elli Nur Hayati, hal 12

⁶⁶ Rachmad Hidayat., “Kapan Ilmu akan berubah?: Lebih dekat kepada Metodologi Feminis”, *Jurnal Perempuan: untuk pencerahan dan kesetaraan*, no 48 (2006) hal 33 - 35

Refleksi ini melibatkan asumsi-asumsi tentang relasi gender yang berlangsung di sekitar subjek penelitian.

Refleksi dapat mengambil tiga bentuk:

a. *Consciousness raising* (pengungkapan kesadaran)

Metode ini dianggap khas dalam penelitian feminis. *Consciousness raising* berarti proyeksi kesadaran oleh subjek, terutama pada konteks subordinasi dan ketertindasan. Si peneliti diminta untuk menyadari bagaimana proses atau jalan menuju pengetahuan telah mempengaruhi pemahamannya. Berlawanan dengan epistemologi modern yang yakin bahwa subjek pengetahuan sifatnya transenden terhadap proses mengetahui, feminis percaya bahwa relasi antara subjek pengetahuan dengan proses pengetahuan berlangsung timbal balik

b. Kolaborasi antara peneliti feminis

Subjek metodologi feminis dalam tahap tertentu bersifat komunal. Banyak karya penting feminis dilakukan lewat kolaborasi dua penulis feminis atau lebih.

c. Menaruh perhatian terhadap tahap-tahap penelitian yang tidak tampak dan tersembunyi. Prosedur ini berguna untuk mengungkapkan dikotomi seksualitas dan ideologi seksualitas tertentu yang bersemayam di balik konsep – konsep dan struktur ilmu.

2. Orientasi pada aksi

Metodologi feminis mensyaratkan pada aksi, dorongan ini bukanlah hal baru dalam filsafat ilmu. Namun penelitian feminis terarah pada ruang

yang lebih luas. Keterkaitan dalam aksi mewakili beberapa asas dalam metodologi feminis yakni:

- a. Kontekstualitas dan ketersituasian dalam teori feminis
- b. Jarak antara subjek dan objek penelitian yang harus dikurangi
- c. Perwujudan sosok subjek yang hadir, konkret dan meyejarah dalam ruang waktu
- d. Keterhubungan subjek penelitian, dengan segala subjektivitasnya, dengan lingkungan historis dimana ilmiah berlangsung.

3. Pertimbangan pada unsur Afeksi

Menurut Cool dan Fonow, epistemologi feminis tidak hanya mengakui dimensi *affection* dalam tindakan mengetahui, namun bahkan mempertimbangkannya sebagai sumber penyelidikan ilmiah dan sebagai unsur signifikan dalam memahami realita sosial. Pengalaman perempuan memunculkan pertimbangan-pertimbangan moral yang fundamental bagi perempuan. *Affection* menjadi alat untuk memahami situasi-situasi khusus dalam kehidupan perempuan. Emosi memiliki fungsi dalam memahami dunia. Dalam metodologi feminis, perhatian pada unsur-unsur *affection* akhirnya menjadi usaha untuk memulihkan kembali dimensi emosional dalam rasionalitas yang terlalu maskulin. Respon emosional terhadap dunia akan berubah apabila dunia dipahami secara berbeda. Bagi subjek penelitian feminis, emosi menjadi bagian dari proses penyingkapan diri dalam setiap tahap penelitian.

4. Pemanfaatan situasi yang tengah berlangsung

Metodologi feminis merekomendasikan pemanfaatan situasi kongkret yang tengah dialami untuk memicu agenda penelitian baru. Ilmu-ilmu konvensional dan ilmu-ilmu lainnya memulai penelitian dengan perencanaan yang matang dan konsep-konsep yang siap pakai sehingga inisiatif penelitian dadakan dan tiba-tiba dalam konteks seperti itu tidak akan populer bahkan tidak bisa diterima. Tidak demikian dengan metodologi feminis, mereka tidak keberatan inisiatif dan rancangan penelitian muncul tiba-tiba.

Keempat prosedur metodologis feminis tersebut sangat dekat hubungannya dengan subordinasi perempuan, dan perdagangan manusia menjadi salah satu contoh subordinasi dan penindasan yang terjadi pada perempuan. Secara sederhana penjelasannya seperti ini: *pertama*, refleksi bertolak dari posisi ketertindasan perempuan. Prinsip refleksi adalah mengungkap pandangan “dari bawah” yang mengalir dari posisi perempuan yang dekat dengan ketidaksetaraan. Dalam kasus ini, penindasan dan ketidaksetaraan yang terjadi terhadap perempuan dan kaum marginal di India melalui kejahatan perdagangan manusia yang membuat mereka bergerak dan membentuk sebuah organisasi perempuan Apne Aap untuk menyalurkan kepentingan mereka (perempuan dan kaum terpinggirkan lainnya) agar terlihat dan dipedulikan oleh negara dan dunia Internasional. *kedua*, orientasi pada aksi menghubungkan kedudukan hirarki perempuan dalam kelas yang tidak diuntungkan dan menyediakan peluang-peluang bagi pembebasannya, Apne Aap ini lah sebagai wadah untuk pembebasan mereka dari ketertindasan serta kejahatan perdagangan manusia yang menakutkan dan membahayakan mereka. *Ketiga*, perhatian pada dimensi *affection* mengungkapkan pengalaman -

pengalaman khas kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, diskriminasi dan seksisme. *Keempat*, pemanfaatan situasi konkret waktu penelitian menghasilkan pola pemahaman yang maju terus dan kritis, penting selama akses terhadap pendanaan, kekuasaan, dan fasilitas ilmiah tidak selalu tersedia untuk ilmuwan feminis.⁶⁷

1.8.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini mengacu pada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena terjadi dan perlu untuk diteliti, serta batasan yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Batasan waktu penelitian ini antara rentang tahun 2002 hingga tahun 2012 dimana pada saat inilah Apne Aap mulai terbentuk, hingga menjadi sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi perempuan dan kaum yang terpinggirkan untuk menyuarakan kepentingan mereka bersama. Sehingga melahirkan bentuk-bentuk strategi serta upaya yang mereka lakukan dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di India.

Perlu ditekankan bahwa dalam penelitian feminis pengalaman-pengalaman yang dialami perempuan menjadi pusat dari penelitian. Maka fokus dari penelitian ini adalah pengalaman-pengalaman yang menyebabkan organisasi Apne Aap lahir, yang mengambil bentuk ketertindasan dan penderitaan perempuan, akibat perdagangan manusia. Sehingga pengalaman-pengalaman ini pula lah yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk strategi serta upaya yang dilakukan oleh Apne Aap untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia karena apa yang telah dialami oleh perempuan tersebut membuat mereka paham dan tahu apa yang mereka butuhkan dan harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini.

⁶⁷ Rachmad Hidayat, hal 36

1.8.4 Unit dan tingkat Analisa

Didalam tradisi penelitian feminis, unit dan tingkat analisa tidaklah ditetapkan secara universal, karena feminis cukup menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan. Namun ada beberapa area yang menjadi fokus penelitian bagi penelitian feminis diantaranya kerusakan atau penindasan yang dialami oleh perempuan dan/atau anak-anak. Sedangkan yang menjadi objek kajian adalah tidak hanya perempuan, tetapi ada anak-anak dan kelompok minoritas. Maka untuk memudahkan penelitian ini, unit analisa menjadi tempat bersumbernya pengalaman-pengalaman perempuan dan menjadi objek yang akan diteliti serta merupakan landasan berlakunya ilmu pengetahuan yang digunakan adalah organisasi, yang dalam penelitian ini merupakan perempuan yang bekerja bersama-sama dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di India dalam lingkup yang menjadi tingkat analisa dari penelitian ini yaitu negara.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Didalam merancang metode pengumpulan data, penelitian feminis tidak memiliki standarisasi yang ditetapkan. Namun didalam pengumpulan data dibutuhkan kehati-hatian karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

1. Penelitian feminis benar-benar mengkritisi pendekatan tradisi *positivist* yang menekankan pada pendekatan *quantitative*, pendekatan variabel dan angka-angka.⁶⁸ Maka tidak mengherankan bila metodologi feminis banyak memilih metode kualitatif daripada kuantitatif dalam penelitiannya.

⁶⁸ Muhayani, *Metodologi penelitian feminis*, hal 8

2. Penelitian feminis menentang tradisi *positivist* yang memberikan jarak antara peneliti dan subjek untuk menjaga objektivitas. Sedangkan penelitian feminis menekankan pada kedekatan dan tidak adanya *power hierarchy* antara peneliti dan subyek penelitian.⁶⁹

Maka untuk memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam melaksanakan penelitian ini dan dengan tidak menghilangkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan metodologi feminisme yang dekat dengan pendekatan kualitatif dengan menemukan data-data yang spesifik perempuan. Data yang spesifik perempuan merujuk kepada data-data yang berisikan pengalaman-pengalaman serta aksi-aksi kelompok perempuan Apne Aap, yang dialami, dijalankan dan dilakukan, sepanjang waktu yang ditetapkan untuk penelitian ini. Hal ini didapat melalui observasi dokumen dan pemahaman yang diperoleh melalui studi dokumentasi, yang didalam penelitian feminis dibagi menjadi dua bahan, yakni bahan catatan tertulis (misalnya buku harian, karya dan jurnal ilmiah, fiksi ilmiah, lukisan dan tulisan di tembok, dan *testimony*) dan bahan narasi dan teks visual (film, acara televisi, iklan, kartu ucapan, foto-foto dukumenter, *talk-show*).⁷⁰

I.8.6 Teknik Analisa Data

Pengalaman perempuan serta bentuk-bentuk aksi yang berhasil dikumpulkan menjadi sumber empiris dan teoritis dalam penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan lalu disusun sehingga menjadi sebuah kejadian yang

⁶⁹ Ibid., hal 9

⁷⁰ Shulamit Reinharz, *Feminist Method in Social Research*, diterjemahkan oleh Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung (Jakarta: *Women Research Intsttue*, 2005) hal 201-202 dan 208

berututan dan dideskripsikan lalu di analisa. Analisa pendalaman data spesifik feminis dengan menggunakan analisa interpretatif⁷¹, analisa yang dilakukan berusaha untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi didalam proses serta upaya Apne Aap dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di India yang nantinya akan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian ini.

I.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB ini menggambarkan secara keseluruhan latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual dan teoritik yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Relasi gender, perdagangan manusia dan kemunculan Apne Aap di India

BAB ini akan berisikan dua sub pokok bahasan, *pertama* gambaran umum mengenai hubungan-hubungan gender dalam masyarakat India, dan hubungan-hubungan dalam tindak kejahatan perdagangan manusia dengan situasi, kondisi serta pengalaman perempuan di India. Bahasan lainnya mengenai sejarah berdirinya Apne Aap dikaitkan dengan informasi sebelumnya tentang situasi perempuan dan perdagangan manusia di India.

⁷¹ Ibid., hal 213

BAB III Perjuangan Apne Aap dalam Memerangi Perdagangan Manusia di India

BAB ini akan menjelaskan rangkaian perjuangan **Apne Aap** untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia, mencakup pendekatan, kebijakan, langkah-langkah, pencapaian – pencapaian serta perubahan yang dibentuk melalui perjuangan tersebut di India

BAB IV Pemahaman strategi yang berlaku pada Apne Aap dalam konteks penanggulangan isu perdagangan manusia di India

BAB ini akan berisikan hasil analisa penulis, melalui proses pemahaman, mengenai upaya Apne Aap sebagai sebuah organisasi anti trafficking, dalam kerangka konsep dan teori yang telah dijelaskan pada BAB Pendahuluan.

BAB V Kesimpulan

BAB ini berisikan ide-ide dan pengetahuan terpenting yang penulis ciptakan dari penelitian, dan cakupan kontribusi yang bisa diberikan untuk lingkungan akademis, dan NGO, serta penelitian feminisme